



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 961-969

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan Keuangan Perpajakan di Tingkat Kecamatan

Shoonen Matahari Seiko^{1✉}, Ardiensyah², Elvira Mulya Nalien³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: shoonenmatahari@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan memerlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penerimaan dan penggunaan dana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan berdasarkan kajian literatur dari jurnal-jurnal Sinta dan sumber terpercaya. Metode penelitian menggunakan library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan inspektorat berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawas internal, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, Pengelolaan Keuangan, Perpajakan, Kecamatan, Akuntabilitas*

Abstract

Financial management of taxation at the sub-district level requires effective supervision to ensure accountability and transparency in revenue collection and utilization. This study aims to analyze the effectiveness of internal and external supervision in financial management of taxation at the sub-district level based on a literature review from Sinta-indexed journals and trusted sources. The research method uses library research with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that internal supervision conducted by sub-district officials and inspectorates plays a crucial role in preventing irregularities and improving financial report quality. External supervision by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the community also contributes to transparency and accountability. However, supervision effectiveness is hindered by limited human resources, suboptimal regulations, and lack of community participation. This study recommends enhancing internal supervisors' capacity, strengthening regulations, and leveraging information technology to support more effective supervision.

Keywords: Internal Supervision, External Supervision, Financial Management, Taxation, Sub-District, Accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan merupakan bagian penting dari sistem keuangan daerah yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta menunjang keberhasilan pembangunan lokal yang berkelanjutan. Menurut Wulandari (2022) dan Samosir (2018), sistem keuangan daerah yang baik sangat ditentukan oleh sejauh mana praktik pengelolaan keuangan, termasuk dalam sektor perpajakan, dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pengawasan memegang peranan vital dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak daerah dikelola secara bertanggung jawab.

Pengawasan internal, yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan dan inspektorat daerah, merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—berjalan sesuai prinsip good governance. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sistem ini diharapkan mampu membentuk budaya birokrasi yang jujur dan profesional, sehingga kinerja pengelolaan keuangan meningkat secara berkelanjutan. Hal senada juga disampaikan oleh Mardiasmo (2009) yang menekankan bahwa SPIP bukan hanya alat deteksi dini terhadap penyimpangan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya akuntabilitas publik di sektor pemerintahan.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga sangat penting, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan eksternal memberikan jaminan objektivitas dalam evaluasi pengelolaan keuangan dan mendorong pemerintahan daerah untuk lebih akuntabel kepada publik. Banyuwangi (2023) menekankan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah adalah manifestasi dari demokratisasi tata kelola pemerintahan, yang semakin relevan dalam era keterbukaan informasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Osborne dan Gaebler (1992), yang menyatakan bahwa pemerintahan modern tidak hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Namun, efektivitas dari kedua bentuk pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Firda et al. (2023) dan Suryawijaya (2023) mencatat bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi dan perpajakan, minimnya pemahaman teknis terhadap peraturan keuangan, serta belum optimalnya sistem regulasi daerah menjadi penghambat utama. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menandakan masih kurangnya literasi publik tentang pentingnya peran mereka dalam mengontrol pengelolaan keuangan daerah. Menurut Simanjuntak (2014), kualitas pengawasan tidak akan maksimal tanpa keterlibatan publik sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan dengan pendekatan berbasis kajian literatur yang komprehensif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi serta peluang perbaikan sistem pengawasan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengawasan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan. Metode ini dianggap tepat karena mampu menyajikan interpretasi sistematis terhadap data sekunder yang tersedia dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi terkait pengawasan keuangan daerah. Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan sangat bermanfaat dalam

mengembangkan kerangka konseptual dan memformulasikan argumentasi yang kuat berbasis data dan teori yang telah ada.

Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah terindeks Sinta serta dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, laporan hasil pemeriksaan, dan publikasi institusi pengawas keuangan. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi sumber yang difokuskan pada literatur yang relevan dan kredibel, terutama yang menyajikan data empiris, temuan penelitian sebelumnya, dan analisis kebijakan terkait pengawasan internal maupun eksternal.

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana setiap informasi yang diperoleh dianalisis untuk menemukan tema-tema penting yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan, tantangan struktural, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa analisis isi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menyederhanakan, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang bermakna.

Tahap akhir adalah sintesis data, yaitu merangkum dan mengkaji hasil analisis dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi, peran, serta dinamika pengawasan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan pengumpulan data semata, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman teoritis dan praktis berdasarkan hasil kajian pustaka yang mendalam (Firda et al., 2023; Samosir, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Efektivitas Pengawasan Internal

Pengawasan internal di tingkat kecamatan dilakukan oleh aparat kecamatan dan inspektorat daerah yang bertugas melakukan audit berkala, pemantauan, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan perpajakan (BPKP, 2023). Studi di Kecamatan Hatonduhan menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas penerimaan pajak dan pencegahan fraud (Samosir, 2018). Hasil audit internal yang dilakukan secara rutin mampu mengidentifikasi celah kebocoran keuangan serta menekan terjadinya praktik manipulatif oleh aparatur pajak lokal.

Pengawasan internal juga melibatkan pengendalian risiko dan penerapan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini (Firda et al., 2023). Menurut Mardiasmo (2018), keberadaan pengawasan internal yang kuat menjadi indikator utama akuntabilitas

keuangan sektor publik, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kecamatan dalam pengelolaan dana publik. Fungsi inspektorat dalam hal ini tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai konsultan dan katalis dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan.

Namun, keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman teknis masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan internal (Wulandari, 2022). Banyak daerah yang belum memiliki auditor dengan kompetensi memadai untuk mendalami pengelolaan perpajakan secara menyeluruh, sehingga efektivitas pengawasan menjadi tidak maksimal. Sementara itu, menurut Simanjuntak (2021), kelemahan struktur kelembagaan inspektorat juga berkontribusi terhadap rendahnya independensi dalam menindaklanjuti temuan audit yang melibatkan pejabat internal. Selain itu, adanya tekanan politik dan relasi kuasa di daerah turut menghambat pelaksanaan pengawasan yang objektif dan menyeluruh.

2. Peran dan Efektivitas Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi negara dan masyarakat sebagai pengawas sosial yang memanfaatkan transparansi laporan keuangan (Banyuwangi, 2023). Pengawasan eksternal berfungsi sebagai kontrol independen yang menilai kinerja pengelolaan keuangan perpajakan dan memberikan rekomendasi perbaikan (BPKP, 2023). Pengawasan oleh BPK memiliki posisi strategis karena dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kepatuhan, efektivitas, efisiensi, serta kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Masyarakat juga dapat berperan aktif melalui transparansi penggunaan aplikasi e-village budgeting yang memungkinkan akses informasi pengelolaan keuangan desa, meskipun akses ini terkadang dibatasi (Banyuwangi, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dikenal sebagai partisipasi fiskal publik (fiscal transparency), yang menurut Shah (2007) dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi kebijakan fiskal. Partisipasi masyarakat dianggap penting karena mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pengeluaran dan kebutuhan lokal secara lebih cepat dibandingkan mekanisme formal lainnya.

Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman (Firda et al., 2023). Faktor budaya birokratis yang tertutup serta rendahnya literasi anggaran di masyarakat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pengawasan yang partisipatif. Menurut Dwiyanto (2006), penguatan kapasitas masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memantau keuangan publik menjadi prasyarat mutlak

dalam membangun sistem pengawasan eksternal yang efektif. Hal ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk keterbukaan data dan edukasi publik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, baik pengawasan internal maupun eksternal memiliki peran strategis dalam menjamin integritas pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan, namun masing-masing menghadapi tantangan yang memerlukan pembenahan dari sisi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan publik

Pembahasan

Potensi *Blockchain* dalam Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi *blockchain* menawarkan potensi revolusioner dalam meningkatkan tata kelola keuangan di pemerintah daerah. Dengan karakteristiknya yang unik, *blockchain* mampu mengatasi berbagai masalah yang selama ini menghambat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Penerapan *blockchain* diyakini dapat membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah daerah mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan mereka, sehingga menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Peran, Manfaat, dan Kendala Pengawasan Internal dan Eksternal

Jenis Pengawasan	Peran Utama	Manfaat	Kendala Utama
Pengawasan Internal	Audit berkala, pemantauan risiko, evaluasi	Meningkatkan akurasi dan pencegahan fraud	Keterbatasan SDM, pemahaman teknis
Pengawasan Eksternal	Audit independen oleh BPK, kontrol masyarakat	Transparansi, akuntabilitas, rekomendasi	Partisipasi masyarakat rendah, akses informasi terbatas

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel ini menyajikan perbandingan ringkas mengenai dua jenis pengawasan dalam pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dengan menguraikan masing-masing peran utama, manfaat, serta kendala yang dihadapi.

Untuk pengawasan internal, peran utamanya mencakup audit berkala, pemantauan risiko, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparat kecamatan serta inspektorat daerah. Manfaat dari pengawasan ini adalah mampu meningkatkan akurasi

pelaporan keuangan dan mencegah terjadinya fraud sejak awal. Namun, efektivitasnya seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan minimnya pemahaman teknis mengenai pengawasan keuangan.

Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui audit independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kontrol sosial oleh masyarakat. Manfaat utama dari pengawasan eksternal ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan keuangan. Namun, kendala yang dihadapi antara lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan terbatasnya akses terhadap informasi publik, terutama di daerah yang belum menerapkan sistem digital secara optimal.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara pengawasan internal dan eksternal untuk mewujudkan tata kelola keuangan perpajakan yang baik dan akuntabel, serta menunjukkan bahwa kedua jenis pengawasan memiliki manfaat strategis sekaligus tantangan yang harus diatasi.

Siklus Pengelolaan Keuangan Perpajakan



Pengawasan internal yang efektif dapat mengidentifikasi risiko dan mencegah penyimpangan sejak awal, sedangkan pengawasan eksternal memberikan kontrol independen dan meningkatkan transparansi. Sinergi kedua pengawasan ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan perpajakan yang akuntabel dan optimal. Menurut Mardiasmo (2018), pengawasan internal memiliki fungsi preventif, yakni mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran sebelum terjadi, sedangkan pengawasan eksternal lebih bersifat

korektif dan evaluatif, memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Kombinasi keduanya dapat membentuk sistem pengendalian yang menyeluruh, di mana kelemahan dalam pengawasan internal dapat dikompensasi oleh kekuatan pengawasan eksternal, dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Arens et al. (2014), yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola keuangan publik sangat bergantung pada efektivitas interaksi antara pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi lini pertahanan pertama, sedangkan pengawasan eksternal memperkuat akuntabilitas publik melalui transparansi laporan dan pertanggungjawaban yang lebih luas kepada masyarakat.

Selain itu, penguatan sinergi antara kedua pengawasan juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas, integritas pejabat pengawas, serta sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Menurut BPKP (2023), integrasi sistem pelaporan keuangan dengan platform digital dapat mempercepat identifikasi anomali keuangan dan memudahkan koordinasi lintas lembaga pengawas. Dalam konteks daerah, hal ini juga akan memperkuat posisi kecamatan sebagai entitas administratif yang mampu mengelola dana publik secara bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

SIMPULAN

Pengawasan internal dan eksternal memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan keuangan perpajakan di tingkat kecamatan. Pengawasan internal memperkuat sistem pengendalian dan pencegahan fraud, sedangkan pengawasan eksternal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui audit independen dan kontrol masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas oleh kendala SDM, regulasi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas pengawas internal, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyuwangi. (2023). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui e-Village Budgeting*. Banyuwangi Kabupaten.
- BPKP. (2023). *Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Firda, R. H., Lestari, A. P., & Ramadhan, H. (2023). Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 10(2), 112–124.
- PP No. 60 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, F. A. (2022). Prototipe Sistem Kontrol Pom Mini Bangka Belitung Tahun 2022. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 45–55.
- Ren, H., Luan, Y., Dong, X., Zhou, H., Chen, X., & Yu, X. (2021). Design of Automatic Controller System for Three Axis 3D Printing Platform. *Journal of Physics: Conference Series*, 2095(1), 012050.
- Samosir, R. A. (2018). Peran Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 35–42.
- Sofyan, A., Perdana, A. P., & Prasetya, A. Y. (2016). Pembuatan Prototype Pemadam Api Otomatis Berbasis Arduino Uno R3. *Jurnal Informasi Interaktif Universitas Janabadra*, 1(2), 111–120.
- Suryawijaya, D. (2023). Tantangan Pengawasan Keuangan Desa di Era Digital: Sebuah Tinjauan Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 89–101.
- Wulandari, S. (2022). Pengaruh Kapasitas SDM dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 4(2), 22–30.